

**ANALISIS DISTRIBUSI SUMBER DAYA MANUSIA PENYULUH
DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**

**YAHYA
105960 1605 14**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

**ANALISIS DISTRIBUSI SUMBER DAYA MANUSIA PENYULUH DAN
KELEMBAGAAN PERTANIAN DI PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

**YAHYA
105960160514**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Serjana Pertanian Strata Satu
(S-1)

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Distribusi Sumber Daya Manusia
Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian di
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nama : Yahya

Nomor Induk Mahasiswa : 105960160514

Konsetrasi : Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

Program Studi : Agribisnis

Fakultas : Pertanian

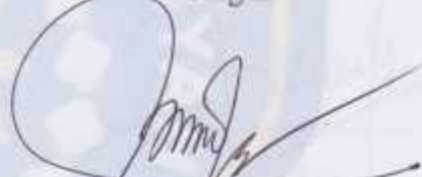
Disetujui

Pembimbing I



Dr. Sri Mardivati, S.P., M.P.
NIDN.0921037003

Pembimbing II



Ardi Rumallang, S.P., M.M.
NIDN.0910088702

Diketahui



Dekan Fakultas Pertanian



H. Burhanuddin, S.Pl., M.P.
NIDN. 0912066901

Ketua Prodi Agribisnis



Dr. Sri Mardivati, S.P., M.P.
NIDN. 0921037003

Tanggal Lulus 13 Agustus 2018

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

DAN SEMENTARA INFORMASI

Judul : Analisis Distribusi Sumber Daya Manusia
Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian di
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nama : Yahya

Nomor Induk Mahasiswa : 105960160514

Konsetrasi : Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

Program Studi : Agribisnis

Fakultas : Pertanian

KOMISI PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Sri Mardiyati, S.P., M.P.
Ketua Sidang

2. Ardi Rumallang, S.P., M.M.
Sekertaris

3. Dr. Ir. Hj. Siti Wardah, M.Si.
Anggot

4. Syatir, S.P., M.Si.
Anggota

Tanggal Lulus: 15 Agustus 2018

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Distribusi Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat** adalah benar merupakan hasil karya yang belum di ajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau di kutip dari karya yang di terbitkan maupun tidak di terbitkan dari penulis lain telah di sebutkan dalam teks dan di cantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Makassar, juli 2018

yahya

105960160514

ABSTRAK

YAHYA. 105960160514. Analisis Distribusi Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dibimbing oleh SRI MARDIYATI dan ARDI RUMALLANG.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan sumber daya manusia penyuluh pertanian, perkembangan kelembagaan pertanian dan rasio distribusi sumber daya manusia penyuluh pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder (*time series*). Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi sederhana (analisis trend).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan sumber daya manusia penyuluh pertanian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) meningkat dengan jumlah 78 penyuluh pertahun, sedangkan perkembangan rumah tangga usaha pertanian meningkat dengan jumlah 4.996 rumah tangga usaha pertahun. Perkembangan kelembagaan kelompok tani dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) meningkat dengan jumlah 1.048 kelompok tani pertahun, sedankan perkembangan kelembagaan gapoktan meningkat dengan jumlah 11 gapoktan pertahun. Rasio distribusi sumber daya manusia penyuluh pertanian dengan rumah tangga usaha pertanian selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) dengan rasio perbandingan rata-rata sebesar 441:1 artinya satu orang penyuluh membimbing 441 rumah tangga usaha pertanian, sedangkan rasio distribusi sumber daya manusia penyuluh pertanian dengan kelompok tani dengan rasio perbandingan rata rata sebesar 11:1 artinya satu orang penyuluh membimbing 11 kelompok tani, dan rasio distribusi sumber daya manusia penyuluh pertanian dengan gapoktan dengan rasio perbandingan rata-rata sebesar 1: 1 artinya satu orang penyuluh membimbing 1 gapoktan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT., atas segala nikmat dan karunianya yang telah tercurahkan yang tiada henti di berikan kepada hamban-Nya, Shalawat dan salam tak lupa para penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, sehingga skripsi ini yang berjudul: “Analisis Distribusi Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat”

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Sri Mardiyati ,S.P.,M.P. Selaku pembimbing I dan Bapak Ardi Rumallang,S.P.,M.M. Selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan penulis , Sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
2. Bapak H. Burhanuddin, S.PI.,M.P. Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Dr. Sri Mardiyati,S.P.,M. Selaku Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kedua orang tua saya ayahanda Lukman dan ibunda Masti, dan Kakak saya Irfan, Jaharudin dan adik-adikku tercinta Latif, Irnawansyah dan Abdul

Riskan dan serta segenap keluarga yang senantiasa memberikaan bantuan, baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini terselesaikan

5. Seluruh dosen Jurusan Agribisi Fakultas pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali segudang ilmu kepada penunulis.
6. Kepada pihak pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususya kepada ketua staf Badan Pengembangan Sumber daya Manusia (BPSDM) yang telah mengijinkan penulis penelitian
7. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi dari awal hingga akhir yang penulis tidak dapat sebut satu persatu.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, semoga karya tulis bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berkait bagi pihak yang membutuhkan semoga kristal kristal Allah senantiasa tercurahkan kepadanya. amin

Makassar, Juli 2018

YAHYA

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pengertian Sumber Daya manusia	5
2.2 Pergertian Penyuluhan Pertanian	9
2.3 Kelembagaan pertanian.....	17
2.4 Kerangka Pemikiran	21
III. METODE PENELITIAN	22
3.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	22
3.2 Jenis dan Sumber Data	22
3.3 Metode Analisis Data	23
3.4 Definisi Operasional	23
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	25
4.1 Kondisi Geografis	25
4.2 Kondisi Demografis	27
4.3 Kondisi Lokasi Penelitian	31
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Perkembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	33

5.2 Perkembangan Sumber Daya Manusia Rumah Tangga Usaha Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat	35
5.2 Perkembangan Kelembagaan Kelompok Tani di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	38
5.3 Perkembangan Kelembagaan Gapoktan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	41
5.4 Rasio Distribusi Penyuluh Pertanian Pada Rumah Tangga Usaha Pertanian di Provinsi Nus Tenggara Barat.....	47
5.5 Rasio Distribusi Penyuluh Pertanian Pada Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Kelompok Tani di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	44
5.6 Rasio Distribusi Gapoktan Dengan Penyuluh di Provinsi Nusa Tenggara Barat.	47
5.7 Perkembangan Sumber Daya Manusia Dan kelembagaan.	50
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
6.1 Kesimpulan	53
6.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKAN	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Lua Daerah Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	25
2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Barat	27
3.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	28
4.	Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	29
5.	Tingkat Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.	31
6.	Rasio Distribusi Penyuluh Pada Gapoktan.....	49

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
	<i>Teks</i>	
1.	Kerangka Pemikiran Analisis Distribusi Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat	21
2.	Grafik Perkembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat	33
3.	Grafik Perkembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	34
4.	Grafik Perkembangan Sumber Daya Manusia Rumah Tangga Usaha Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat	36
5.	Grafik Perkembangan Sumber Daya Manusia Rumah Tangga Usaha Pertanian di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	37
6.	Grafik Perkembangan Kelembagaan Kelompok Tani di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	39
7.	Grafik Perkembangan Kelembagaan Kelompok Tani di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	40
8.	Grafik Perkembangan Kelembagaan Gapoktan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	42
9.	Grafik Perkembangan Kelembagaan Gapoktan di Setiap Kabupaten/ Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	43
10.	Grafik Rasio Distribusi Penyuluh Pertanian Pada Rumah Tangga Usaha Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	45
11.	Grafik Rasio Distribusi Penyuluh Pertanian Pada Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Kelompok Tani di Provinsi Nusa Tenggara Barat	47
12.	Grafik Perkembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian.....	51
13.	Dokumentasi Penelitian	66

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat	57
2.	Jumlah Total Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat	58
3.	Jumlah Penyuluh Pertanian di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	58
4.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	59
5.	Jumlah Kelembagaan Kelompok Tani di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat	59
6.	Jumlah Kelembagaan Gapoktan di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	60
7.	Rasio Perbandingan Rumah Tangga Usaha Pertanian Dengan Penyuluh di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	60
8.	Rasio Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Denga Jumlah Penyuluh di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	61
9.	Rasio Perbandingan Jumlah Kelompok Tani Dengan Jumlah Penyuluh di Provinsi Nusa Tenggara Barat	61
10	Rasio Perbandingan Jumlah Kelompok Tani Dengan Jumlah Penyuluh di Provinsi Nusa Tenggara Barat	61
12.	Hasil Analisa Trend Perkembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh di Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	62
13.	Hasil Analisa Trend Sumber Daya Manusia Rumah Tangga Usaha Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat	62
14.	Hasil Analisa Trend Perkembangan Kelembagaan Kelompok Tani di Provinsi Nusa Tenggara Barat	63
..		

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyuluhan pertanian bagian dari system pembangunan pertanian yang merupakan system pendidikan di luar sekolah (pendidikan non formal) bagi petani beserta keluarganya dan anggota masyarakat lainnya yang terlibat dalam pembangunan pertanian, dengan demikian penyuluhan pertanian adalah suatu upaya untuk terciptanya iklim yang kondusif guna membantu petani beserta keluarga agar dapat berkembang menjadi dinamis serta mampu untuk memperbaiki kehidupan dan penhidupannya dengan kekuatan sendiri dan pada akhirnya mampu menolong dirinya sendiri (Soeharto, N.P.2005).

Selanjutnya dikatakan oleh Salim,F. (2005), Bahwa penyuluhan pertanian adalah upaya pemberdayaan petani dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui kegiatan pendidikan non formal dibidang pertanian agar mampu menolong dirinya sendiri baik dibidang ekonomi, social maupun politik, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai.

Margono Slamet (2000), Menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyuluhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Dalam konsep pember-dayaan tersebut, terkandung pema-haman bahwa pemberdayaan tersebut diarahkan terwujudnya masyarakat madani (yang beradab)

dan mandiri dalam pengertian dapat mengambil keputusan (yang terbaik) bagi kesejahteraannya sendiri.

Dalam hal ini perlu adanya peran pemerintah yang berkerja di bidang pertanian untuk mendistribusikan tenaga penyuluhan pertanian di setiap daerah untuk membina dan membimbing petani dalam segala hal yg berkaitan dengan usaha pertanian sebagaimana seorang penyuluh salah satu pelaku fasilitator dan sebagai motivasi untuk para petani dalam meningkatkan hasil pertanian. Dengan hal ini pula penyuluhan pertanian harus mampu membina dan membimbing setiap lembaga yg di bangun oleh para petani seperti kelompok tani, gapoktan dan bukan hanya sekedar itu saja penyuluh pertanian harus mampu membina setiap rumah tangga yang melakukan usaha pertaniannya.(Hanafie, 2010).

Dengan melihat persoalan sumber daya manusia penyuluh pertanian di Indonesia secara khusus bagi wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi wilayah bagian barat juga sangat unggul dalam pengelolaan pertanian, sehingga perlu adanya usaha peningkatan mutu sumber daya penyuluhan pertanian bagi seluruh elemen masyarakat dalam usaha peningkatan pertanian. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah sepakat untuk menjadikan daerah di setiap wilayah di Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi sentral pertanian dan ketahanan pangan maupun pertanian lainnya.

Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengatakan, Dalam program peningkatan kualitas sumber daya pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan Jaminan kepada setiap masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya pertanian yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

dengan mendistribusikan tenaga sumber daya manusia penyuluh pertanian di setiap daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk membantu petani dalam mengelola usaha pertanian supaya semakin baik dari hasil sebelumnya.

Dari kasus di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **Analisis Distribusi Sumber Daya Manusia (Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian) di Provinsi Nusa Tenggara Barat.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka pokok masalah yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana perkembangan sumber daya manusia (SDM) penyuluh pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat ?
2. Bagaimana perkembangan kelembagaan pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
3. Bagaimana rasio distribusi sumber daya manusia (SDM) penyuluh pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat ?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui perkembangan sumber daya manusia (SDM) penyuluh pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- b. Untuk mengetahui perkembangan kelembagaan pertanian di Provinsi Nusa Tenggara.
- c. Untuk mengetahui rasio distribusi sumber daya manusia (SDM) penyuluh pertanian di Provinsi Nusa Tenggara.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, untuk lembaga perguruan tinggi maupun bagi lembaga penyuluh pertanian antara lain :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan penulis tentang penelitian yang dilakukan.
- b. Memberikan masukan bagi petani sehingga dalam bekerja dapat mengembangkan usahanya dengan baik.
- c. Memberikan informasi kepada pihak lain tentang bagaimana system penyuluhan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Sebagai persyaratan akademis dalam penyelesaian studi strata 1 (S1) pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi. Werther dan Davis yang dikutip oleh Edy Sutrisno menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi (Werther dan Davis dalam Sutrisno, 2009). Timbulnya kebutuhan untuk membantu organisasi dalam melaksanakan tujuannya merupakan profesionalisme dalam bekerja. Kebutuhan akan profesionalisme menunjukkan bahwa semakin berperannya sumber daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi.

Tujuan organisasi agar dapat tercapai dengan baik, dibutuhkan sumber daya manusia yang memenuhi syarat-syarat dan kriteria organisasi (Sofyandi, 2008). Kriteria organisasi tersebut diharapkan akan terbentuk sumber daya manusia yang produktif yang berguna terhadap pencapaian tujuan organisasi. Menurut Hadari Nawawi yang dikutip oleh Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah yang dimaksudkan sebagai sumber daya manusia meliputi tiga pengertian yaitu : Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan).

- a. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- b. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material / non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang

dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (*real*) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensinya. (Nawawi dalam Sulistiyani dan Rosidah, 2003).

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa yang dimaksud sumber daya manusia adalah manusia yang ada dalam lingkungan suatu organisasi untuk bekerja, yang memiliki potensi untuk melaksanakan kegiatan organisasi. Sumber daya manusia juga dapat disebut sebagai aset yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk menghasilkan suatu potensi dalam bentuk hasil kerja yang nyata bagi kepentingan organisasi. Sejalan dengan definisi sumber daya manusia di atas, Faustino Cardoso Gomes menyebutkan bahwa : “Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Secara umum sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi bisa dikelompokkan atas dua macam, yaitu :

a. Sumber daya manusia (*human resource*).

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia makro secara umum terdiri dari dua yaitu SDM makro yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di sebuah wilayah, dan SDM mikro dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan.

b. Sumber daya non-manusia (*non-human resources*) (Gomes, 2003).

Sumber daya manusia merupakan potensi yang dimiliki oleh manusia seperti keahlian, kemampuan sedangkan sumber daya non manusia terdiri atas,

sumber daya alam (*natural resources*), modal, mesin, teknologi, material. Kedua sumber daya tersebut sangat penting, akan tetapi sumber daya manusia merupakan faktor dominan, karena sumber daya manusia memiliki akal, perasaan, keinginan, pengetahuan, keterampilan, kebutuhan dan sebagainya. Prinsipnya, bahwa sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang sangat menentukan organisasi. Sumber daya manusia (*human resources*) memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Secara makro, sumber daya manusia merupakan keseluruhan potensitenaga yang terdapat di suatu negara, jadi menggambarkan jumlahangkatan kerja dari suatu negara / daerah.
2. Secara mikro, sumber daya manusia merupakan segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja / organisasi tertentu baik pemerintah maupun swasta. (Wahyudi, 1996).

Pengertian sumber daya manusia mencakup semua unsur yang dimilikinya. Unsur yang dimilikinya itu seperti, energi, bakat, keterampilan, kondisi fisik dan mental manusia yang dapat digunakan untuk berproduksi. Unsur yang dimiliki diharapkan dapat menunjang kebutuhan dalam mencapai tujuan. Sumber daya manusia dipandang memiliki peranan yang semakin besar bagi kesuksesan suatu organisasi. Organisasi pemerintah maupun swasta menyadari bahwa unsur “manusia” yang memiliki keunggulan dalam bersaing akan membawa organisasi kearah yang lebih maju. Unsur-unsur (*variables*) sumber daya manusia menurut Faustino Cardoso Gomes dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Sumber Daya Manusia* meliputi :

- a. Kemampuan-kemampuan (*Capabilities*),
- b. Sikap (*Attitudes*)
- c. Nilai-nilai (*Values*)
- d. Kebutuhan-kebutuhan (*Needs*)
- e. Karakteristik demografisnya (Gomes, 2003).

Unsur-unsur sumber daya manusia seperti kemampuan, sikap, nilai kerja, kebutuhan serta kependudukan merupakan daya yang terdapat pada manusia. Memperoleh sumber daya tersebut tergantung dari manajemen sumber daya manusianya mulai dari penarikan sumber daya manusia, seleksi, pengembangan, pemeliharaan sumber daya manusia harus dilakukan secara selektif untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. “Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah sumber daya yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif, tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti *intelligence*, *creativity*, dan *imagination*; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga, otot dan sebagainya. (Ndaraha, 1999).

Pendapat Taliziduhu Ndaraha menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang tinggi mampu menggunakan daya yang bersumber pada dirinya tidak hanya otot, keterampilan dan kemampuan tetapi pola pikir, kecerdasan dan kekreatifitas. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan.

2.2 Pengertian Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian merupakan kegiatan kongkrit di lapangan yang berkaitan dengan keadaan kelembagaan dalam pertanian. Penyuluhan pertanian di perlukan untuk meningkatkan produksi bidang pertanian. Hal ini telah dibuktikan dengan tercapainya sewasembada pangan di Indonesia setelah digiatkan penyuluhan dalam bidang pertanian. Meskipun harus di akui bahwa tidak semua kebutuhan dengan memproduksinya sendiri alias masih harus dilakukan impor seperti kedelai, tepung tapioka, cengkeh, dan lain-lain. Untuk mendalami tentang peran penting penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian di Indonesia terlebih dahulu perlu dipahami arti penting penyuluhan pertanian di maksud.

a) Arti penyuluhan pertanian

Secara umum penyuluhan diartikan suatu ilmu sosial yang mempeleajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat untuk mencapai tujuan. Penyuluhan merupakan suatu sistem pendidikan yang bersifat non-formal. Dapat pula dikatakan bahwa penyuluhan merupakan sistem pendidikan di luar sistem persekolahan yang biasa. Pada penyuluhan ditunjukkan cara-cara mencapai sesuatu dengan memuaskan sambil orang tersebut teetap mengerjakan sendiri. Penyuluhan juga dapat diartikan sebagai suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan hasil usaha dan tingkat kehidupannya.

Berbagai pendapat dari para ahli tentang penyuluhan pertanian telah mengemukakan dan kiranya bermanfaat karena dapat memperjelas pengertian

penyuluhan pertanian yang sedang dicermati. Beberapa di antara pendapat para ahli tersebut dikemukakan berikut ini seperti dilaporkan oleh Kartasapoetra, A.G. (1991) berikut ini:

1. *U. Samsudin S.* Berpendapat bahwa penyuluhan pertanian adalah suatu cara atau usaha pendidikan yang bersifat no-formal untuk para petani dan keluarganya diperdesaan.
2. *Hasmosoewignjo* dan *A. Garnaadi* berpendapat penyuluhan pertanian merupakan pendidikan pada rakyat tani baik dilaksanakan di rumah, di tempat-tempat tertentu atau dimana saja para petani dapat ditemui.
3. *Jack Ferner* mengemukakan bahwa penyuluhan pertanian khusus merupakan ilmu terpakai yang mengemukakan teori-teori, prosedur dan cara-cara yang terutama menyampaikan teknologi baru yang di dapat dari aktivitas penelitian melalui ilmu pertanian, ilmu sosial kepada para petani secara proses pendidikan non-formal, sehingga petani dibekali pengetahuan praktis guna menghadapi tantangan dan masalah-masalah yang akan sedang dihadapinya. Dalam penyuluhan pertanian diutamakan teknologi baru kemudian dikembangkan kepada para petani sesuai dengan kehendak dan usahanya untuk meningkatkan produk usaha taninya, tingkat kehiupan serta pencegahan-pencegahan timbulnya masalah yang akan dihadapi serta pemecahannya dalam usaha tani yang sedang dijalankan.
4. *A.T. Mosher* berpendapat dalam penyuluhan pertanian terkandung arti aktivitas pendidikan di luar bangku sekolah (no-formal) dengan sifat-sifatnya yakni:

- a. selalu berhubungan dengan masyarakat petani diperdesaan yang sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan pada waktu tertentu yang sangat berkaitan dengan mata pencaharian tetap atau usaha taninya guna mencapai tujuan taraf hidup baik petani itu sendiri beserta keluarganya maupun masyarakat disekelilingnya.
 - b. Menggunakan cara-cara dan metode khusus yang disesuaikan dengan sifat, perilaku dan kepentingn petaninya.
 - c. Keberhasilan pelaksanaannya memerlukan bantuan berbagai aktivitas yang sifatnya langsung maupun tidak langsung dalam menunjang pendidikan di maksud. Aktivitas penunjang pendidikan yang sifatnya langsung seperti perencanaan penyuluhan, penjadwalan waktu dan evaluasi, sedangkan penunjang pendidikan yang sifatnya tidak langsung misalnya penyediaan sarana produksi dan sifatnya pengolahan hasil yang memadai.
 - d. Pelaksanaan pendidikan non-formal ini dilangsungkan dalam suasana koperasi dan toleransi, musyawarah untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan berkaitan dengan pelaksanaan usaha tani.
5. *Mac F. Millikan* dan *D. Hoopgood* berpendapat bahwa penyuluhan pertanian merupakan pendidikan yang sifatnya tidak formal. Pendidikan ini tertju pada masyarakat perdesaan tanpa batasan umur dan jenis kelamin.

Tujuannya yaitu untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam menghadapi tantangan dan memecahkan segala permasalahan yang akan dihadapi atau sedang dihadapi.

b) Fungsi penyuluhan pertanian

Penyuluhan pertanian lebih tegas terarah pada usaha memberikan bimbingan dengan mengutamakan dasar-dasar adanya kebebasan lokasi, kebebasan kurikulum, disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan para petani, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya sangsi-sangsi, dan sifat pembaharuan dan hal-hal yang baru. Penyuluhan pertanian di nilai memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan pertanian di Indonesia dengan giatnya dilakukan penyuluhan pertanian di seluruh pelosok tanah air oleh Dinas Pertanian dan para petugas PPL-nya mulai tampak perubahan pada diri petani, keluarga, dan lingkungannya sehingga mereka dapat mencapai keinginannya, meningkatkan produksinya dan penghasilan-penghasilannya. Dengan adanya penyuluhan pertanian tersebut para petani dapat menolong dirinya (*self help*) termasuk mampu mengatasi atau memecahkan masalah-masalah yang ada pada diri mereka sendiri.

Walaupun dalam memecahkan segala permasalahan yang mereka hadapi dilakukan secara bergotong royong dengan masyarakat lainnya. Penyuluhan pertanian juga terbukti dapat menjembatani gap antara praktek yang harus atau bisa dijalankan oleh para petani dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang dan menjadi kebutuhan para petani sendiri. Para petani berkeinginan mempraktekan pertanian dengan baik sehingga nanti dapat meningkatkan usaha taninya. Wajar jika petani membutuhkan pengetahuan dan teknologi bidang pertanian yang lebih mantap. Dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian para penyuluh atau petugas PPL akan mendidik dan membimbing para petani dengan pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang untuk diterapkan petani

masing-masing pada usaha taninya. Melalui penyuluhan pertanian, maka program-program pembangunan pertanian secara nasional dapat disampaikan kepada petani.

c) Tujuan penyuluhan pertanian

Tujuan di selenggarakan penyuluhan pertanian di Indonesia dalam kapasitasnya memberikan dukungan dalam pelaksanaan program-program pembangunan pertanian dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

1. Tujuan penyuluhan pertanian jangka pendek

Yaitu untuk menubuhkan perubahan-perubahan yang lebih terarah dalam aktivitas usaha tani di pedesaan, perubahan-perubahan tersebut harus meliputi tingkat pengetahuan, kecakapan atau sikap kemampuan dan motif tindakan petani. Perubahan tingkat pengetahuan ini meliputi perubahan-perubahan dalam hal kecakapan atau kemampuan berpikir semula yang kurang perhatian atau gambaran adanya hal-hal yang menguntungkan setelah dilakukan penyuluhan menjadi lebih perhatian dan cakap/terampil dari sebelumnya, perubahan sikap meliputi perubahan-perubahan dalam perilaku dan perasaan yang didukung oleh adanya peningkatan kecakapan, kemampuan, dan pemikiran. Perubahan motif tindakan perubahan-perubahan perilaku petani menjadi yang lebih baik dan menguntungkan usaha tani mereka dari perilaku sebelumnya.

Setelah menerima penyuluhan para petani akan bersifat lebih terbuka menerima petunjuk dan bimbingan yang akan lebih menguntungkan, lebih aktif

dan dinamis dalam melaksanakan usaha tani. Untuk itu perlu di dukung perilaku-perilaku positif seperti dikemukakan oleh Kertasapoetra, A.G. (1991) berikut ini:

- a. Dilakukan pertemuan-pertemuan yang sifatnya kontinyu antara penyuluh dan para petani guna mendiskusikan segala daya upaya untuk meningkatkan produksi dari usaha tani.
- b. Di bina hubungan yang kontinyu antara para penyuluh dengan para petani sehingga tercipta rasa kekeluargaan yang akan memepermudah dan memperlancar pemberian dan penerimaan informasi dalam rangka peningkatan produksi.
- c. Dilakukan aktivitas-aktivitas latihan-latihan sebagai praktek peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petani.
- d. Dilakukan pembenahan kelompok-kelompok petani agar aktif melakukan kegiatan-kegiatan sehingga terwujud kesatupaduan dalam usaha meningkatkan taraf hidup para petani diperdesaan.
- e. Diberikan motivasi agar para petani yang telah mencapai kemajuan sanggup menularkan pengalamannya kepada petani yang lain agar mengikuti penyuluhan-penyuluhan pertanian atau bersedia mengikuti cara-cara yang telah dipraktekan dan telah nyata mendatangkan keberhasilan.
- f. Diakukan kegiatan-kegiatan lapangan dengan mengikutsertakan para petani dalam karyawisata, kunjungan-kunjungan pada pameran pertanian, lomba tani dan lain-lain agar para petani dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan pandangannya sebagai usaha pendekatan antara mereka denga masyarakat luar yang lebih maju.

- g. Diberikan informasi yang lebih luas kepada para petani bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) keberadaannya memang ditunjukkan untuk membantu memperlancar peningkatan usaha tani berupa kredit usaha tani, kredit sarana kebutuhan petani, penampung hasil usaha para petani dan lain-lain.

Indikasi terjadinya perubahan perilaku petani yang telah menerima penyuluhan tersebut tampak ketika dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti berikut ini:

1. Petani mau bertanya tentang materi yang disuluhkan tentang masalah yang sedang dihadapi dengan mengusahakan petunjuk-petunjuk yang berharga bagi kepentingannya atau kepentingan sesama petani.
2. Petani terangsang untuk selalu mengikuti kegiatan penyuluhan dan membantunya secara aktif mendiskusikan hal-hal yang ada kaitannya dengan usaha tani dengan sesama petani yang lain.
3. Petani dengan penuh kesadaran dan keterbukaan bersedia menerima materi yang disuluhkan baik secara bertatap muka dengan penyuluh atau yang di dengar/di baca dari media masa, radio, televisi, dan lain-lain.
4. Petani menjadi terdorong oleh keyakinan yakni akan mampu meningkatkan usaha taninya. Petani mau berusaha mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan teknologi baru dari media-media lain disamping memperluas komunikasi dengan perkembangan dunia pengetahuan.

2. Tujuan penyuluhan pertanian jangka panjang

Yaitu agar tercapai peningkatan taraf hidup masyarakat petani mencapai kesejahteraan hidup yang lebih terjamin. Tujuan ini dapat tercapai apabila para petani telah melakukan hal-hal seperti dikemukakan berikut ini:

- a. Petani telah sanggup dan dapat mengubah cara-cara usaha tani mereka menjadi yang lebih baik (*better farming*).
- b. Petani bertindak yang lebih menguntungkan misalnya menghindari rayuan para *pengijon*, lintah darat dengan iming-iming kucuran dana yang mudah didapatkan sebelum panen dilakukan (*better business*), dan lain-lain tindakan yang dapat merugikan petani sendiri.
- c. Petani berlaku hemat, tidak hidup berfoyah-foyah ketika usai panen. Dengan pernyataan lain petani harus berlaku hidup yang baik (*better living*). Hendaknya petani suka menabung, bekerjasama memperbaiki kesehatan lingkungan, mendirikan industri-industri rumahan (*home industry*) guna mengisi kekosongan waktu selama menunggu panen tiba, mendirikan industri kecil dengan penerapan sistem gotong royong untuk meningkatkan kualitas produk dan lain sebagainya.

Jika tujuan jangka panjang kegiatan penyuluhan pertanian tersebut dapat tercapai dengan di indikasi terbentuknya *better farming*, *better business* dan *better living* pada petani, maka peran petani akan memillikki kemampuan untuk mengelolah usaha taninya dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan mengelola usahatanin di cerminkan oleh kemampuan berswasembada memeperbaiki atau membangun prasaranan-prasaranan

yang di butuhkan di lingkungan perdesaan mereka sehingga memperlancar usahatani mereka seperti irigasi, jala, jembatan, tempat ibadah, keamanan dan lain-lain. Petani juga sanggup berpartisipasi dalam pemerintahan setempat guna dapat terwujudkan pencapaian tujuan hidup petani yang terjabar dalam tiga hal yang yakni tercapainya keadaan hidup petani yang *better farming, better business, dan better living.s*

2.3 Kelembagaan Pertanian

a. Kelembagaan

Kegiatan pertanian lebih banyak dilaksanakan di daerah-daerah atau di desa-desa. Sejak dahulu petani telah membuat aturan yang disepakati bersama dalam kegiatan pertanian yang ada di daerah tersebut misalnya mulai dari sistem pengembangan air, jenis tanaman yang dibudidayakan dalam kurung waktu yang bersamaan, sistem sewa menyewa tanah untuk pertanian, dan lain-lain. Petani membuat kesepakatan-kesepakatan yang kemudian di akui sebagai aturan. Secara umum dalam masyarakat diberlakukan kaidah-kaidah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perkembangannya dikemudian hari kaidah-kaidah tersebut tertampung dalam wadah yang dinamakan lembaga. Dalam kegiatan pertanian untuk dapat mencapai tujuannya melibatkan lembaga terkait yang sifatnya lembaga formal maupun informal. Sebelum membicarakan jenis-jenis lembaga terkait dimaksud perlu mengerti lebih dulu arti lembaga agar tidak terjadi kesalahan persepsi.

Soetrisno, dkk. (2006) mengemukakan pengertian lembaga (*institution*) dalam hal ini dimaknai suatu organisasi atau kaidah-kaidah bersifat formal

maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu, baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam lembaga-lembaga yang ada yang sifatnya asli berada dari adat kebiasaan yang turun temurun dan ada pula yang dibuat oleh masyarakat desa tersebut. Selain hal itu lembaga yang dianut oleh masyarakat desa tertentu yang berasal dari luar masyarakat desa yang bersangkutan.

Dalam perkembangannya kini lembaga-lembaga dimaksud telah banyak yang dibuat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Lebih khususnya lagi lembaga-lembaga yang mewadahi kegiatan pertanian telah disesuaikan dengan iklim pembangunan pertanian dan kondisi perdesaan. Telah banyak lembaga jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka biasanya pelakunya akan disoroti oleh anggota masyarakat lainnya sehingga mendapatkan malu. Lembaga adat dalam pertanian diantaranya mengatur kepemilikan tanah pertanian, jual beli hasil-hasil pertanian dalam koperasi, dan lain-lain.

b. Kelembagaan Pertanian

Kelembagaan usaha tani memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha tani (Viswanathan, 2006). Namun, fakta di lapangan menyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kelembagaan yang dibentuk secara top down oleh Pemerintah, dengan kelembagaan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha tani (Togbe et al, 2012). Selama ini pendekatan kelembagaan juga telah menjadi komponen pokok dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Namun, kelembagaan usaha tani, terutama kelompok petani cenderung hanya diposisikan sebagai alat untuk

mengimplementasikan proyek belaka, belum sebagai upaya untuk pemberdayaan yang lebih mendasar (Wahyuni, 2003).

Satu hal yang sangat kritis adalah bahwa meningkatnya produksi pertanian atau output selama ini belum disertai dengan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani secara signifikan dalam usaha taninya. Petani sebagai unit agribisnis terkecil belum mampu meraih nilai tambah yang rasional sesuai skala usaha tani terpadu (integrated farming system). Oleh karena itu persoalan membangun kelembagaan (institution) di bidang pertanian dalam pengertian yang luas menjadi semakin penting, agar petani mampu melaksanakan kegiatan yang tidak hanya menyangkut on farm bussiness saja, akan tetapi juga terkait erat dengan aspek-aspek off farm agribussinessnya (Tjiptoherijanto, 1996).

Syarat mutlak (syarat pokok pembangunan pertanian), yang terdiri dari pasar untuk hasil-hasil usahatani, teknologi yang selalu berubah, tersedianya bahan-bahan produksi dan peralatan secara local, insentif produksi bagi para petani, pengangkutan (transportasi). Pembangunan pertanian yang berkelanjutan membutuhkan hal-hal berikut ini pendidikan sistem pertanian, kredit produksi, kegiatan gotong royong oleh para petani, perbaikan dan perluasan tanah/lahan pertanian, perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian (Mosher, 1965 dalam Soekartawi, 2002).

Kelembagaan dan lembaga pada hakekatnya mempunyai beberapa perbedaan. Dari aspek kajian sosial lembaga merupakan pola perilaku yang selalu berulang dan bersifat kokoh serta dihargai oleh masyarakat (Huntington,1965). Dalam pengertian lain lembaga adalah sekumpulan norma dan perilaku yang telah

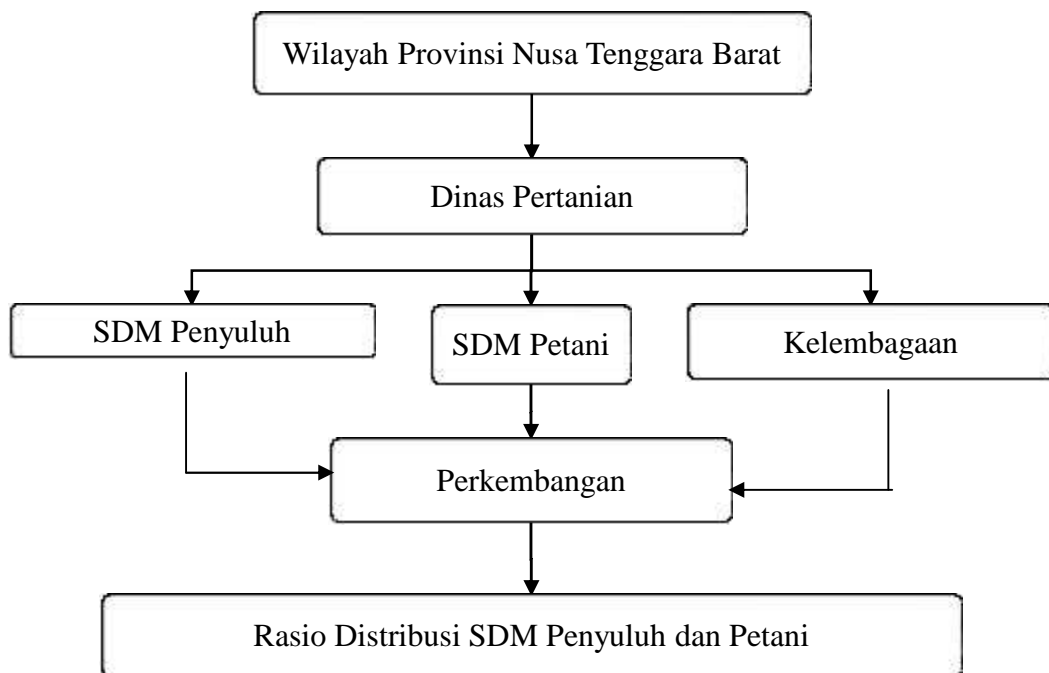
berlangsung dalam waktu yang lama dan digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kelembagaan adalah suatu jaringan yang terdiri dari sejumlah orang atau lembaga untuk tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. (Uphoff,1986)

Dalam hal ini lembaga dapat memiliki struktur yang tegas dan formal, dan lembaga dapat menjalankan satu fungsi kelembagaan atau lebih. Kelembagaan pertanian memiliki delapan jenis kelembagaan, yaitu 1) kelembagaan penyedia input, 2) kelembagaan penyedia modal, 3) kelembagaan penyedia tenaga kerja, 4) kelembagaan penyedia lahan dan air, 5) kelembagaan usaha tani, 6) kelembagaan pengolah hasil usaha tani, 7) kelembagaan pemasaran, 8) kelembagaan penyedia informasi.

Bentuk kelembagaan rantai pasok pertanian terdiri dari dua pola, yaitu pola perdagangan umum dan pola kemitraan. Ikatan antara petani dan pedagang umumnya ikatan langganan, tanpa adanya kontrak perjanjian yang mengikat antarkeduanya dan hanya mengandalkan kepercayaan. Petani dan pedagang pada pola ini juga sering melakukan ikatan pinjaman modal. Sedangkan pola kemitraan rantai pasok pertanian adalah hubungan kerja di antara beberapa pelaku rantai pasok yang menggunakan mekanisme perjanjian atau kontrak tertulis dalam jangka waktu tertentu. Dalam kontrak tersebut dibuat kesepakatan-kesepakatan yang akan menjadi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat (Marimin dan Maghfiroh, 2010).

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan kerangka teori di atas, maka pelaksanaan penelitian yang dilakukan tentang analisis distri sumber daya manusia penyuluh dan kelembgaan pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui analis kerangka pikir peneliti bisa melihat bagaimana penempatan penyuluh pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat, berikut Kerangka Penelitian :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Analisis Distribusi Sumber Daya Manas (Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2018. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja, dengan pertimbangan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu wilayah yang memiliki perkembangan pertanian yang sangat tinggi.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif sumber dari data sekunder (time series) selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Menurut Supranto (2001) Data sekunder merupakan data deretan waktu (time series), yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu (hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun). Data deretan waktu bisa digunakan untuk melihat perkembangan kegiatan tertentu, sehingga bisa digunakan perkiraan-perkiraan yang sangat berguna bagi dasar perencanaan.

Adapun instansi yang dijadikan sebagai sumber data penelitian ini adalah badan pusat statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat, kementerian pertanian serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Analisis trend

Metode trend yang di gunakan adalah metode kuadrat yang terkecil (least square method), dengan formula sebagai berikut (djawanto,2001):

$$Y=a+bx$$

Keterangan:

X = Periode waktu

Y = Variabel yang di distribusikan (SDM dan Kelembagaan)

A = Intercept/konstanta (nilai Y apabila X=0)

B = Besarnya perubahan variabel Y yang terjadi pada setiap perubahan satu unit variabel X.

3.4 Definisi Operasional

1. Sumber daya manusia penyuluh yang di maksud dalam penelitian ini adalah jumlah penyuluh pertanian pegawai negeri sipil, tenaga harian lepas tenaga bantu dan swadaya
2. Sumber daya manusia petanian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rumah tangga usaha pertanian
3. Kelembagaan yang di maksud dalam penelitian ini adalah kelembagaan kelompok tani dan kelembagaan gapoktan

4. Rasio distribusi sumber daya manusia penyuluh dan petani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbandingan jumlah sumber daya manusia penyuluh dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi Geografis

1. Luas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 49.312,19 km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (23,51%). Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas delapan kabupaten dan dua kota. Kabupaten Sumbawa adalah kabupaten terluas dengan luas 6.643,98 Km². Sedangkan kabupaten atau kota terkecil adalah kota Mataram dengan luas 61,30 Km² (0,30 % dari luas keseluruhan provinsi Nusa Tenggara Barat).

Luas Provinsi Nusa Tenggara Barat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 1. Luas Daerah Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kabupaten /Kota	Luas Area (Km ²)	Persentase (%)
1	Lombok Barat	1.053,92	5,23
2	Lombok Tengah	1.208,40	6,00
3	Lombok Timur	1.605,55	7,97
4	Lombok Utara	809,53	4,02
5	Kota Mataram	61,30	0,30
6	Sumbawa	6.643,98	32,97
7	Sumbawa Barat	1.849,02	9,17
8	Dompu	2.324,60	11,53
9	Bima	4.389,40	21,78
10	Kota Bima	207,50	1,03
Jumlah/Total		20.153,20	100

Sumber : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

2. Letak wilayah

Letak dan kondisi geografis provinsi Nusa Tenggara Barat terletak antara $115^{\circ} 46' - 119^{\circ} 5'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 10' - 9^{\circ} 5'$ Lintang Selatan, dan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Laut Flores
- 2) Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- 3) Sebelah Barat : Selat Lombok atau Provinsi Bali
- 4) Sebelah Timur : Selat Sape atau Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Iklim

Berdasarkan data statistik dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dari tiga kota yang diamati yaitu kota Mataram, Sumbawa Besar dan Bima dimana temperatur maksimum terjadi di kota Sumbawa Besar mencapai 37°C dan minimum terjadi di Kota Mataram dengan suhu 17°C . temperature tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan temperatur terendah terjadi pada bulan Agustus. Secara umum distribusi curah hujan berkisar antara 0-20 mm pada bulan Agustus 2015, hal ini menunjukkan wilayah Nusa Tenggara Barat masih berada dalam periode musim Kemarau.

4.2 Kondisi Demografis

1. Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kabupaten	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Lombok Barat	303.210	317.202	620.412
2	Lombok Tengah	416.774	464.912	881.686
3	Lombok Timur	526.179	604.186	1.130.365
4	Lombok Utara	100.953	104.111	205.064
5	Kota Mataram	207.440	212.201	419.641
6	Sumbawa	217.257	208.871	426.128
7	Sumbawa Barat	61.353	59.814	121.167
8	Dompu	114.186	112.032	226.218
9	Bima	224.454	226.522	450.976
10	Kota Bima	72.915	75.730	148.645
Jumlah		2.244.721	2.385.585	4.630.302

Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017

Tabel di atas menjelaskan jumlah seluruh penduduk Nusa Tenggara Barat sebanyak 4.630.302 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.244.721 jiwa dan perempuan sebanyak 2.385.585 yang tersebar diseluruh kabupaten/kota. Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah penduduk paling besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya yaitu sebesar 1.130.365 jiwa, sedangkan kabupaten Sumbawa Barat adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terkecil yaitu sebesar 121.167 jiwa.

2. Keadaan penduduk berdasarkan usia

Menurut kelompok umur, komposisi penduduk terbanyak pada umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 485.171 jiwa. Sedangkan penduduk terkecil pada kelompok umur 60-64 tahun sebanyak 122.048. secara keseluruhan penduduk yang produktif atau kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 64,45% sampai saat ini ,jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Keompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	249.049	236.122	485.171
5-9	240.696	228.204	468.900
10-14	237.417	225.419	462.836
15-19	219.129	216.261	435.380
20-24	180.825	211.291	392.116
25-29	183.099	221.393	404.492
30-34	168.309	197.901	366.210
35-39	161.534	181.123	343.657
40-44	138.026	153.336	296.362
45-49	116.058	126.111	242.169
50-54	101.791	109.547	211.244
55-59	73.784	74.186	147.970
60-64	59.525	62.523	122.048
65+	99.251	114.752	214.005
Jumlah/Total	2.228.493	2.359.069	4.587.562

Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017

3. Keadaan Penduduk berdasarkan mata pencarian

Tabel 4. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencarian di Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Pertanian	892.313	45.02
2	Pertambangan dan Penggalian	33 559	1.69
3	Industri	159 809	8.06
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1528	0.08
5	Bangunan	106 885	5.39
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	373 815	18.86
7	Pengangkutan dan Komunikasi	71 448	3.61
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	30702	1.55
9	Jasa-jasa	311 783	15.73

Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017

Sektor Pertambangan dan penggalian terutama pertambangan bijih dan logam berkontribusi sangat besar dalam menciptakan lapangan usaha. Pada tahun 2014 hanya sebesar 73.19 persen kemudian pada tahun 2015 meningkat cukup besar yaitu sejumlah 86.81 persen. Meskipun sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor unggulan di provinsi Nusa Tenggara Barat tetapi persentase penduduk yang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian hanya sebesar 1.69 persen. Akan tetapi persentase penduduk Nusa Tenggara Barat yang bekerja di sektor pertanian masih menduduki urutan pertama yaitu sebesar 45.02 persen pada tahun 2013.

Berdasarkan fakta tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian tidak dapat begitu saja dikesampingkan dari perkembangan perekonomian. Hal ini terjadi karena karena sektor tersebut dapat menyerap banyak tenaga kerja terutama di pedesaan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan fakta bahwa sebagian besar wilayah di provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki persentase pekerja di sektor pertanian dominan adalah pada wilayah kabupaten, sedangkan wilayah kota sektor pertanian bukan merupakan sektor yang dominan dalam menyerap tenaga kerja.

4. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan menurut UU SISIKNAS NO.20 tahun 2003 merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan dan keterampilan yang diperlakukan oleh dirinya dan masyarakat.

Todaro (1995) mengungkapkan pentingnya sebuah pendidikan disuatu negara, terlebih negara berkembang seperti Indonesia ini pendidikan disemua tingkat atau jenjang pendidikan telah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kab/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Lombok Barat	82.03	81.82	81.41	88.06	84.77
Lombok Tengah	84.37	85.64	84.08	84.06	85.4
Lombok Timur	97.62	92.16	92.11	91.66	91.54
Sumbawa	79.53	78.11	77.25	78.96	78.7
Dompu	74.33	74.97	74.06	73.5	73.91
Bima	78.32	77.49	77.89	77.84	76.43
Sumbawa Barat	73.53	73.45	72.5	72.96	73.92
Lombok Utara	77.54	76.44	77.9	71.95	77.18
Kota Mataram	75.48	73.95	77.75	75.62	74.55
Kota Bima	73.34	71.88	72.27	71.83	72.14

Sumber: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa tingkat pendidikan tertinggi dalam hal ini angka melek huruf adalah di Kota Mataram, dimana ditahun 2013 94,52. Sedangkan tingkat pendidikan terendah berada di Kabupaten Lombok Tengah yang pada tahun 2013 sebesar 75,63 dan di tahun 2017 mengalami kenaikan hingga sebesar 81,6.

4.3 Kondisi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi memiliki dua pulau di antara pulau lombok dan sumbawa dan di kililingi oleh 280 pulau pulau-kecil. Luas wilayah propivinsi nusa tenggara barat mencapai 49.312,9km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 km (40,87%) dan perairan laut seluas 20.159,04 km

(54,13%) dengan panjang garis pantai 2.333 km. Luas pulau sumbawa mencapai 15.414,5 km² (23,51%)

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan hasil analisis trend pada perkembangan sumber daya manusia penyuluh pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu mengalami fluktuasi selama kurung waktu lima tahun terakhir dari tahun 2013-2017. Berikut adalah hasil analisis perkembangan sumber daya manusia penyuluh pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

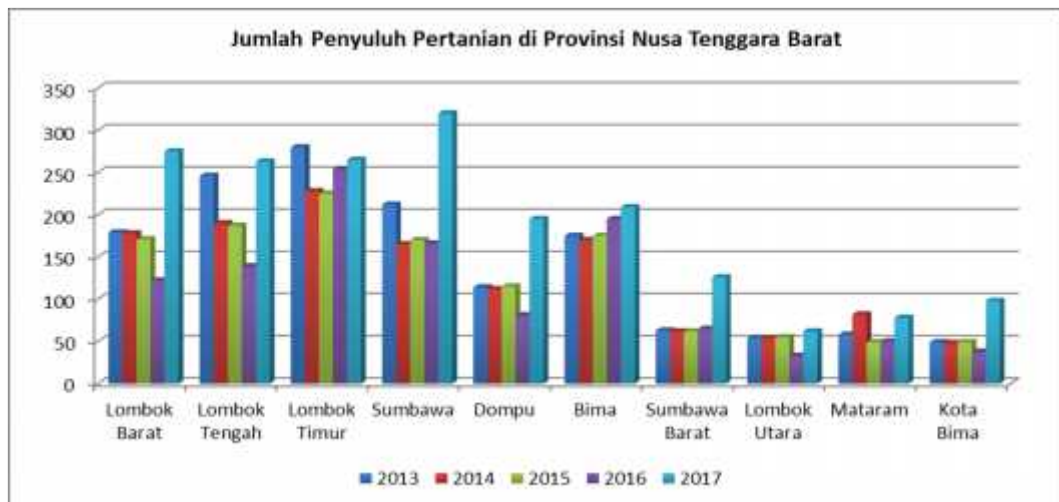


Gambar 2. Garafik Perkembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017.

Berdasarkan grafik trend pada Gambar di atas dapat kita lihat bahwa perkembangan jumlah penyuluh di Provinsi Nusa Tenggara Barat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dapat kita lihat bahwa peningkatan jumlah penyuluh pertanian pada tahun 2017 dengan jumlah 1.891 penyuluh dari tahun sebelumnya yang mengalami penurunan. Berdasarkan hasil analisis trend dengan menggunakan uji trend linear maka di peroleh garis linear $y=77,6x-154962$ trend di sini bernilai

negatif yang artinya perkembangan jumlah penyuluh sedang mengalami flutuasi dan perkembangan penyuluh pertahun selama kurun waktu 5 tahun terakhir meningkat sejumlah 78 penyuluh pertahun.

Sedangkan perkembangan penyuluh pertanian di setiap kabupaten/kota dapat di kita lihat grafik di bawah ini :



Gambar 3. Grafik Perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluh di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017.

Berdasarkan gambar grafik di atas, dapat di jelaskan bahwa pada tahun 2013 kabupaten yang mengalami perkembangan jumlah sumber daya manusia penyuluh pertanian adalah kabupaten Lombok timur dengan jumlah sebanyak 280 penyuluh pertanian. Sedangkan kota bima mengalami kekurangan penyuluh dengan jumlah 49 penyuluh pertanian.

Perkembangan sumber daya manusia penyuluh pertanian di tahun 2014 yaitu kabupaten Lombok timur sebanyak 220 jumlah penyuluh pertanian. Sedangkan kota bima mengalami kekurangan penyuluh dengan jumlah 48 penyuluh pertanian.

Perkembangan sumber daya manusia penyuluh pertanian pada tahun 2015 yaitu kabupaten lombok timur sebanyak 225 jumlah penyuluh pertanian. Sedangkan kota Mataram mengalami kekurangan penyuluh dengan jumlah 49 penyuluh pertanian.

Perkembangan sumber daya manusia penyuluh pertanian di tahun 2016 yaitu kabupaten lombok timur sebanyak 254 penyuluh pertanian. Sedangkan kabupaten lombok utara mengalami kekurangan penyuluh dengan jumlah 33 penyuluh pertanian.

Perkembangan sumber daya manusia penyuluh pertanian di tahun 2017 yaitu kabupaten sumbawa sebanyak 320 jumlah penyuluh pertanian. Sedangkan kabupaten Lombok utara mengalami kekurangan dengan jumlah 62 penyuluh pertanian

5.2 Perkembangan Sumber Daya Manusia Rumah Tangga Usaha Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat

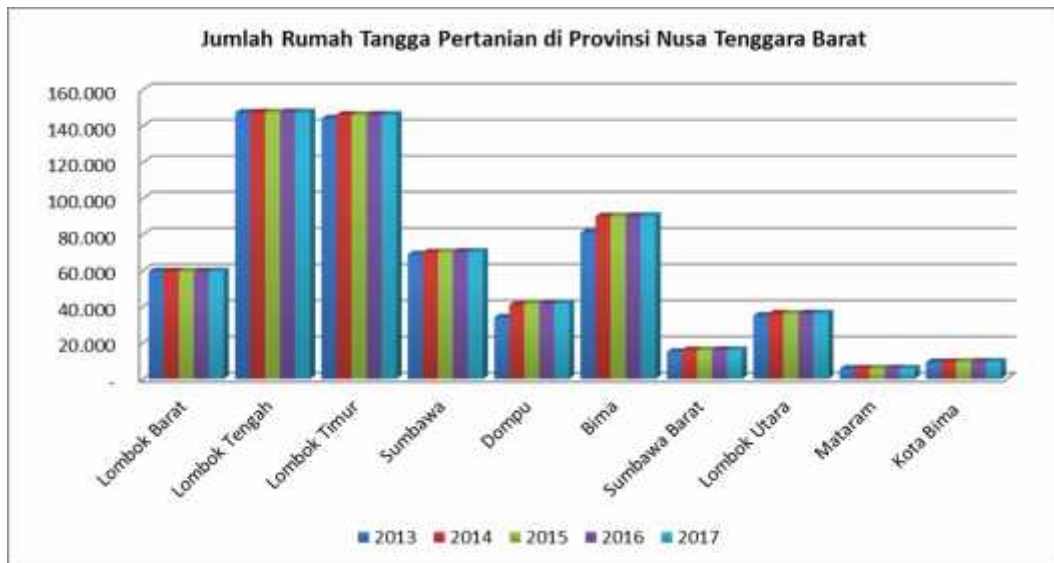
Berdasarkan hasil analisis trend pada perkembangan sumber daya manusia rumah tangga usaha pertanian di provinsi nusa tenggara barat selalu mengalami perkembangan selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2013-2017. Berikut adalah hasil analisis perkembangan sumber daya manusia rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Gambar 4. Grafik Perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Tangga Usaha Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017.

Berdasarkan gambar grafik trend di atas dapat kita lihat bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dapat kita lihat perkembangan jumlah rumah tangga usaha pertanian 2013 sampai 2017 terus mengalami perkembangan, dan perkembangan yang paling tinggi pada tahun 2017 dengan jumlah perkembangan 624.500 rumah tangga usaha pertanian. Berdasarkan hasil analisis trend menggunakan uji trend linear mendapatkan garis trend $y = 4995,5x - 9E+06$ trend di sini bernilai positif yang artinya bahwa perkembangan jumlah rumah tangga usaha pertanian dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terus mengalami perkembangan dan perkembangan rumah tangga usaha pertanian selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) meningkat sejumlah 4996 rumah tangga usaha pertanian pertahun.

Sedangkan perkembangan sumber daya manusia rumah tangga usaha pertanian di setiap Kabupaten/Kota dapat kita lihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 5. Grafik Perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Tangga Usaha Pertanian di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dari gambar grafik di atas, dapat jelaskan bahwa pada tahun 2013 kabupaten lombok tengah mengalami perkembangan sumber daya manusia rumah tangga usaha pertanian dengan jumlah sebanyak 147.455 rumah tangga usaha pertanian. Sedangkan kota mataram mengalami kekurangan rumah tangga usaha pertanian dengan jumlah sebanyak 5719 rumah tangga usaha pertanian.

Perkembangan sumber daya manusia rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2014 yaitu di kabupaten lombok tengah dengan jumlah sebanyak 147.600 rumah tangga usaha pertanian. Sedangkan kota mataram mengalami kekurangan rumah tangga usaha pertanian dengan jumlah sebanyak 5.800 rumah tangga usaha pertanian.

Perkembangan sumber daya manusia rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2015 yaitu kabupaten lombok tengah dengan jumlah sebanyak 147.621 rumah tangga usaha pertanian. Sedangkan kota mataram mengalami kekurangan

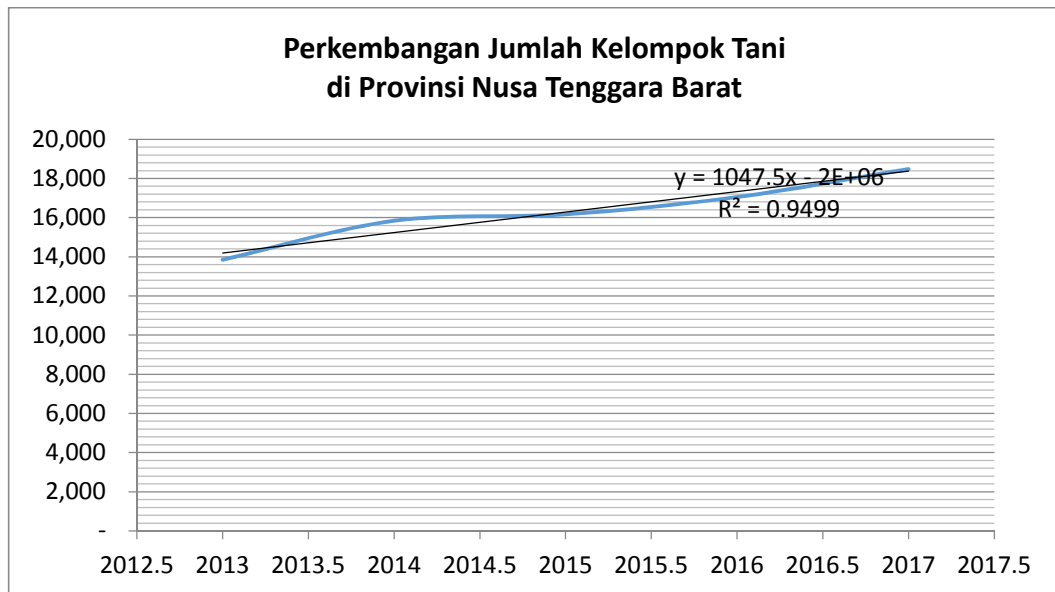
rumah tangga usaha pertanian dengan jumlah sebanyak 5.861 rumah tangga usaha pertanian.

Perkembangan sumber daya manusia rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2016 yaitu kabupaten lombok tengah dengan jumlah sebanyak 147.732 rumah tangga usaha pertanian. Sedangkan kota mataram mengalami kekurangan rumah tangga usaha pertanian dengan jumlah sebanyak 5.875 rumah tangga usaha pertanian.

Perkembangan sumber daya manusia rumah tangga usaha pertanian pada tahun 2017 yaitu kabupaten lombok tengah dengan jumlah sebanyak 147.740 rumah tangga usaha pertanian. Sedangkan kota mataram mengalami kekurangan rumah tangga usaha pertanian dengan banyak jumlah sebanyak 5.894 rumah tangga usaha pertanian.

5.3 Perkembangan Kelembagaan Kelompok Tani di Provinsi Nusa Tenggara Barat

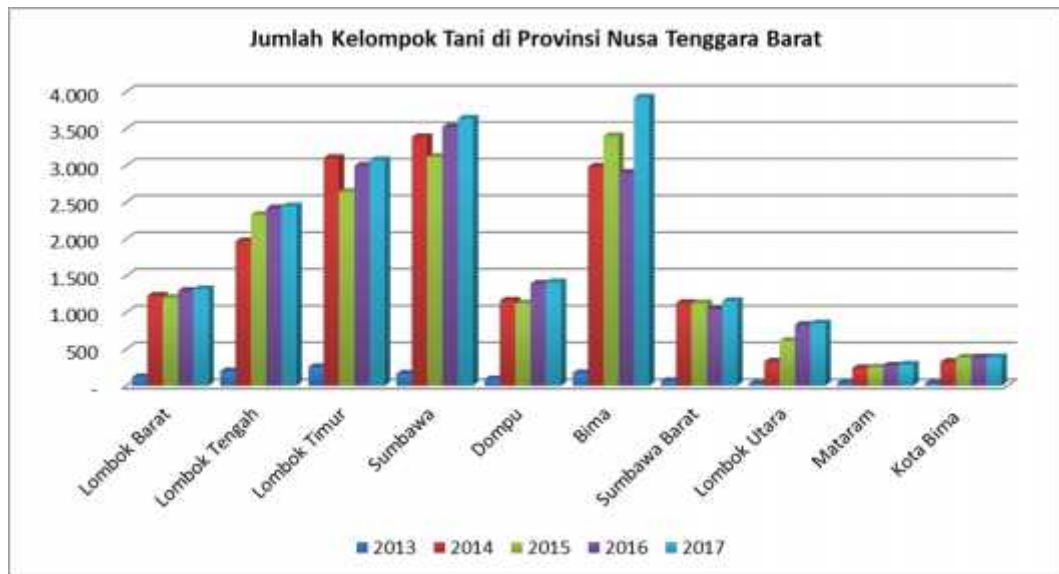
Berdasarkan hasil analisis trend pada perkembangan jumlah kelompok tani di Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu mengalami perkembangan selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2013-2017. Berikut adalah hasil analisis perkembangan jumlah kelompok tani di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Gambar 4. Grafik Perkembangan Kelembagaan Kelompok Tani di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017

Berdasarkan pada gambar grafik trend di atas dapat kita lihat bahwa perkembangan jumlah kelompok tani di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dengan jumlah perkembangan tertinggi pada tahun 2017 sebanyak 18.480 kelompok tani. Berdasarkan hasil analisis trend dengan uji trend linear di peroleh garis linear $y=1047,5x-2E+06$ trend di sini bernilai positif yang artinya perkembangan jumlah kelompok tani selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) meningkat dengan jumlah 1048 kelompok tani pertahun.

Sedangkan perkembangan perkembangan kelembagaan kelompok tani di setiap Kabupaten/Kota dapat kita lihat pada grafik di bawa ini :



Gambar 7. Grafik Perkembangan Kelembagaan Kelompok Tani di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Tahun 2013-2017.

Dari gambar Grafik diatas, dapat di jelaskan bahwa pada tahun 2013 kabupaten lombok timur mengalami perkembangan kelembagaan kelompok tani dengan jumlah sebanyak 256 kelompok tani. Sedangkan kabupaten lombok utara mengalami kekurangan kelembagaan kelompok tani dengan jumlah sebanyak 33 kelompok tani.

Perkembangan kelembagaan kelompok tani pada tahun 2014 yaitu di kabupaten Sumbawa dengan jumlah sebanyak 3.385 kelompok tani. Sedangkan kota mataram mengalami kekurangan kelembagaan kelompok tani dengan jumlah sebanyak 240 kelompok tani.

Perkembangan kelembagaan kelompok tani pada tahun 2015 yaitu di kabupaten Bima dengan jumlah sebanyak 3.398 kelompok tani. Sedangkan di kabupaten lombok utara mengalami kekurangan kelembagaan kelompok tani dengan jumlah sebanyak 249 kelompok tani.

Perkembangan kelembagaan kelompok tani pada tahun 2016 yaitu di kabupaten sumbawa dengan jumlah sebanyak 3.524 kelompok tani. Sedangkan di kota mataram mengalami kekurangan kelembagaan kelompok tani dengan jumlah sebanyak 276 kelompok tani.

Perkembangan kelembagaan kelompok tani pada tahun 2017 yaitu di kabupaten sumbawa dengan jumlah sebanyak 3.637 kelompok tani. Sedangkan kota mataram mengalami kekurangan kelembagaan kelompok tani dengan jumlah sebanyak 289 kelompok tani.

5.4. Perkembangan Kelembagaan Gapoktan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

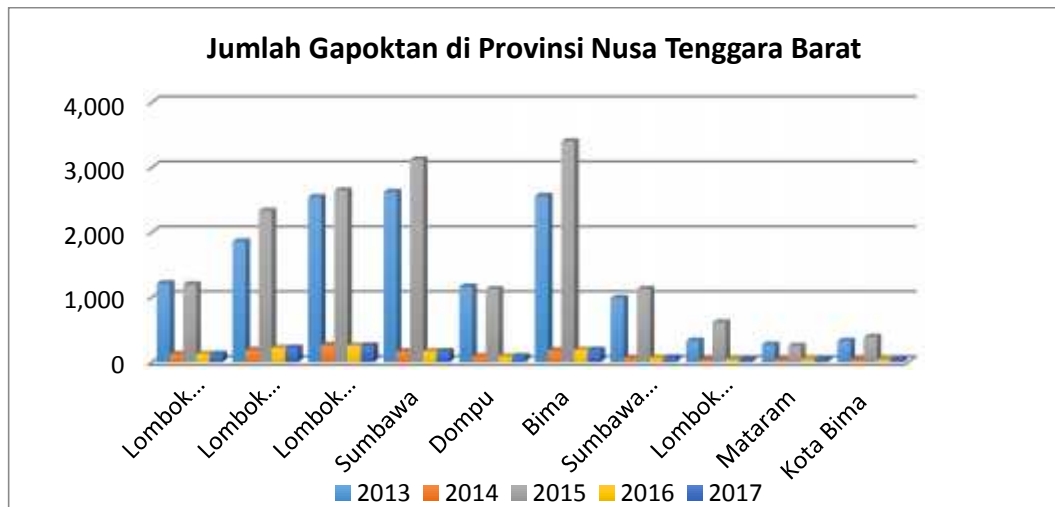
Berdasarkan hasil analisis trend pada perkembangan jumlah gapoktan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu mengalami perkembangan selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2013-2017. Berikut adalah hasil analisis perkembangan jumlah kelembagaan gapoktan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Gambar 8. Grafik Perkembangan Kelembagaan Gapoktan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Tahun 2013-2017.

Berdasarkan gambar grafik trend di atas, dapat kita lihat perkembangan jumlah gapoktan terus mengalami perkembangan dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Perkembangan jumlah gapoktan paling tinggi pada tahun 2017 sebanyak 1.218 jumlah gapoktan. Berdasarkan hasil analisis trend perkembangan jumlah gapoktan di atas di peroleh garis trend $y=10,9x-20768$ trend di sini bernilai positif yang artinya bahwa perkembangan jumlah gapoktan terus mengalami perkembangan yang sangat baik dengan perkembangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) meningkat dengan jumlah 11 gapoktan pertahun.

Sedangkankan perkembangan kelembaggan gapoktan di setiap kabupaten kota dapat kita lihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 9. Grafik Perkembangan Kelembagaan Gapoktan di Setia Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dari gambar grafik di atas, dapat jelaskan bahwa pada tahun 2013 di kabupaten bima mengalami perkembangan kelembagaan gapoktan dengan jumlah sebanyak 2.559 gapoktan. Sedangkan kota mataram mengalami kekurangan kelembagaan gapoktan dengan jumlah sebanyak 268 gapoktan.

Perkembangan kelembagaan gapoktan pada tahun 2014 yaitu di kabupaten lombok timur dengan jumlah sebanyak 262 gapoktan. Sedangkan kabupaten lombok utara mengalami kekurangan kelembagaan gapoktan dengan jumlah sebanyak 33 gapoktan.

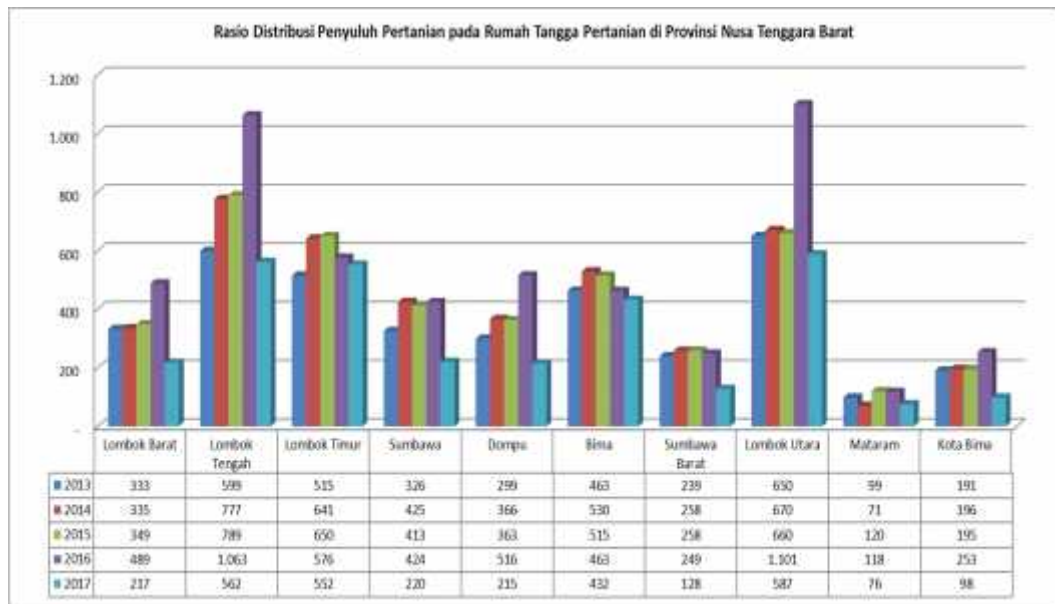
Perkembangan kelembagaan gapoktan pada tahun 2015 yaitu di kabupaten bima dengan jumlah sebanyak 3.398 gapoktan. Sedangkan kota mataram mengalami kekurangan kelembagaan gapoktan dengan jumlah sebanyak 249 gapoktan.

Perkembangan kelembagaan gapoktan pada tahun 2016 yaitu di kabupaten lombok timur dengan jumlah 253 gapoktan. Sedangkan kabupaten lombok utara mengalami kekurangan kelembagaan gapoktan dengan jumlah sebanyak 37 gapoktan.

Perkembangan kelembagaan gapoktan pada tahun 2017 yaitu di kabupaten lombok timur dengan jumlah sebanyak 253 gapoktan. Sedangkan kabupaten lombok utara mengalami kekurangan kelembagaan gapoktan dengan jumlah sebanyak 37 gapoktan.

5.4 Rasio distribusi Penyuluh Pertanian Pada Rumah Tangga Usaha Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rasio distrisbusi sumber daya manusia penyuluh pertanian pada rumah tangga usaha pertanian tujuanya untuk melihat seberapa banyak jumlah rumah tangga pertanian yang di tanggung oleh penyuluh, dengan melihat perbandingan maka dapat kita ketahui kabupaten/kota yang menjadi kekurarngan penyuluh di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan membandingkan jumlah penyuluh dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat kita lihat pada grafik sebagai berikut:.



Gambar 10. Grafik Rasio Distribusi Sumber Daya Manusia Penyuluh Dengan Rumah Tangga Usaha Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat Pada Tahun 2013-2017.

Dari grafik di atas, pada tahun 2013 dapat di jelaskan bahwa di kabupaten Lombok utara mengalami kekurangan penyuluh dengan rasio perbandingan antara rumah tangga usaha pertanian dengan penyuluh adalah 650:1. Artinya orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 650 rumah tangga usaha pertanian. Sedangkan kota mataram mengalami kelebihan penyuluh dengan rasio perbandingan antara rumah tangga usaha pertanian dengan penyuluh adalah 99:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 99 rumah tangga usaha pertanian.

Rasio distribusi penyuluh pertanian pada tahun 2014 dapat kita lihat bahwa di kabupaten lombok tengah mengalami kekurangan penyuluh dengan rasio perbandingan antara rumah tangga usaha pertanian dengan penyuluh adalah 777:1. Artinya 1 orang penyuluh membimbing 777 rumah tangga usaha pertanian.

Sedangkan di kota mataram kelebihan penyuluh dengan rasio perbandingan antara rumah tangga usaha pertanian dengan penyuluh adalah 71:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 71 rumah tangga usaha pertanian.

Rasio distribusi penyuluh pertanian pada tahun 2015 dapat kita lihat bahwa di kabupaten lombok tengah mengalami kekurangan penyuluh dengan rasio perbandingan antara rumah tangga usaha pertanian dengan penyuluh adalah 789:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 789 rumah tangga usaha pertanian. Sedangkan kota mataram yang mengalami kelebihan penyuluh dengan rasio perbandingan antara rumah tangga usaha pertanian dengan penyuluh adalah 120:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 120 rumah tangga usaha pertanian.

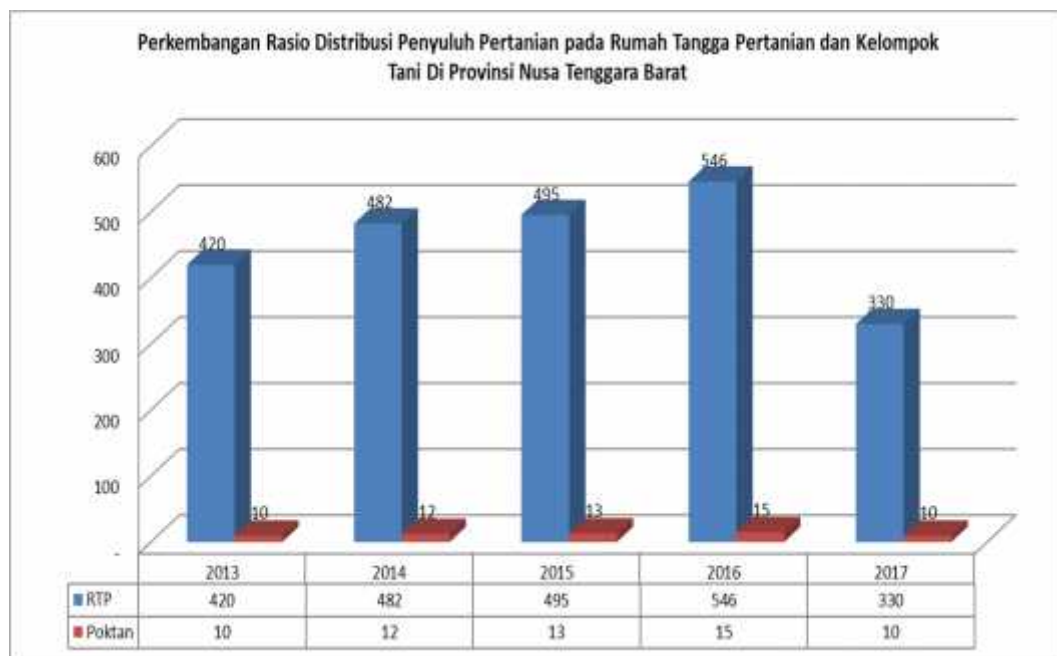
Rasio distribusi penyuluh pertanian pada tahun 2016 dapat kita lihat bahwa di kabupaten lombok utara mengalami kekurangan penyuluh dengan rasio perbandingan antara rumah tangga usaha pertanian dengan penyuluh adalah 1.101:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 1.101 rumah tangga usaha pertanian. Sedangkan kota mataram yang mengalami kelebihan penyuluh dengan rasio perbandingan antara rumah tangga usaha pertanian dengan penyuluh adalah 118:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 118 rumah tangga usaha pertanian.

Rasio distribusi penyuluh pertanian pada tahun 2017 bahwa di kabupaten lombok utara mengalami kekurangan penyuluh dengan rasio perbandingan antara rumah tangga usaha pertanian dengan penyuluh adalah 587:1. Artinya 1 orang

penyuluh bertanggung jawab terhadap 587 rumah tangga usaha pertanian. Sedangkan kota mataram yang mengalami kelebihan penyuluh dengan rasio perbandingan antara rumah tangga usaha pertanian dengan penyuluh adalah 76:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 76 rumah tangga usaha pertanian.

5.5 Rasio Distribusi Penyuluh Pertanian Pada Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Kelompok Tani di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hasil analisis rasio distribusi penyuluh pertanian pada rumah tangga usaha pertanian dan kelompok dengan membandingkan jumlah penyuluh dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian dan jumlah penyuluh dengan jumlah kelompok tani dapat kita lihat pada grafik di bawah ini



Gambar 11. Grafik Rasio Distribusi Penyuluh Pertanian Pada Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Kelompok Tani di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2013-2017.

Dari grafik di atas, dapat di jelaskan bahwa pada tahun 2013 rasio perbandingan penyuluh pada rumah tangga usaha pertanian adalah 482:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 482 rumah tangga usaha pertanian. Sedangkan rasio perbandingan penyuluh pada kelompok tani adalah 10:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 10 kelompok tani.

pada tahun 2014 rasio perbandingan penyuluh pada rumah tangga usaha pertanian adalah 420:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 420 rumah tangga usaha pertanian. Sedangkan rasio perbandingan penyuluh pada kelompok tani adalah 12:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 12 kelompok tani.

Pada tahun 2015 rasio perbandingan penyuluh pada rumah tangga usaha pertanian adalah 495:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 420 rumah tangga usaha pertanian. Sedangkan rasio perbandingan penyuluh pada kelompok tani adalah 13:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 10 kelompok tani.

Pada tahun 2016 rasio perbandingan penyuluh pada rumah tangga usaha pertanian adalah 546:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 546 rumah tangga usaha pertanian. Sedangkan rasio perbandingan penyuluh pada kelompok tani adalah 15:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 15 kelompok tani.

Pada tahun 2017 rasio perbandingan penyuluh pada rumah tangga usaha pertanian adalah 330:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 330 rumah tangga usaha pertanian. Sedangkan rasio perbandingan penyuluh pada

kelompok tani adalah 10:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 10 kelompok tani.

5.6 Rasio Distribusi Penyuluh Pada Gapoktan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hasil analisis rasio distribusi penyuluh pada gapoktan dengan membandingkan jumlah penyuluh dengan jumlah gapoktan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini

Tabel 12. Rasio Distribusi Penyuluh Pada Gapoktan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tahun	Jumlah Gapoktan	Jumlah Penyuluh	Rasio	Rasio
2013	1.179	1.430	1	1 : 1
2014	1.182	1.289	1	1 : 1
2015	1.188	1.258	1	1 : 1
2016	1.213	1.143	1	1 : 1
2017	1.218	1.891	1	1 : 1

Sumber : Data Sekunder di Olah 2018.

Dari tabel di atas, dapat di jelaskan bahwa pada tahun 2013 rasio perbandingan gapoktan dengan penyuluh adalah 1:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 1 gapoktan.

pada tahun 2014 dapat di jelaskan bahwa rasio perbandingan antara gapoktan dengan penyuluh adalah 1:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 1 gapoktan.

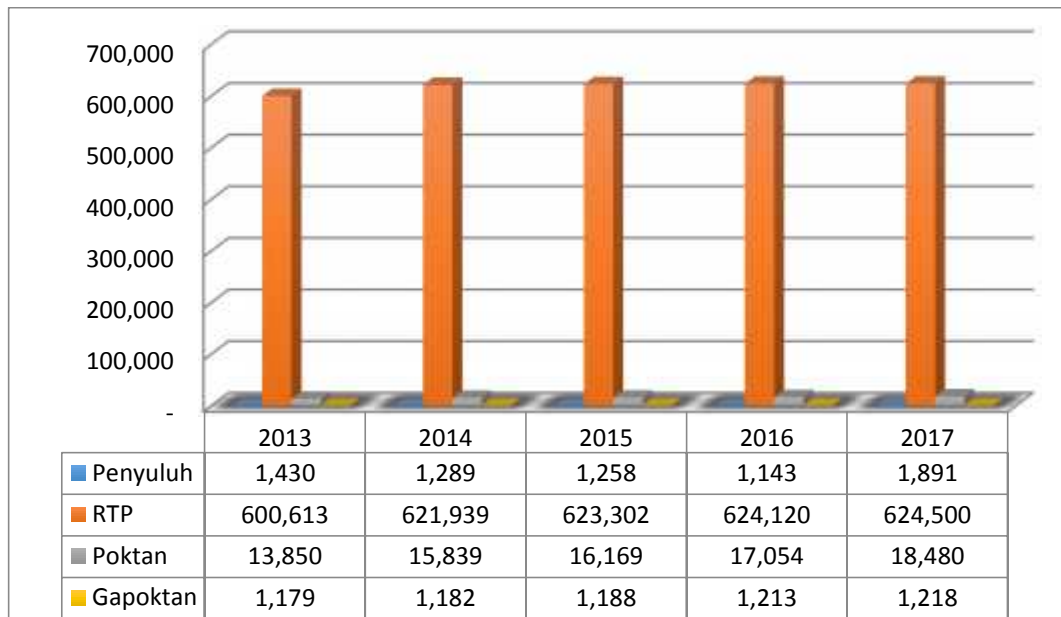
pada tahun 2015 dapat di jelaskan bahwa rasio perbandingan antara gapoktan dengan penyuluh adalah 1:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 1 gapoktan.

pada tahun 2016 dapat di jelaskan bahwa rasio perbandingan antara gapoktan dengan penyuluh adalah 1:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 1 gapoktan.

pada tahun 2017 dapat di jelaskan bahwa rasio perbandingan antara gapoktan dengan penyuluh adalah 1:1. Artinya 1 orang penyuluh bertanggung jawab terhadap 1 gapoktan.

5.7 Perkembangan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Perkembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari tahun 2013 samapi dengan tahun 2017 merupakan sesuatu hal yang di harapkan untuk menunjang keberhasilan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penghasilan pertanian. Oleh karena itu untuk melihat perkembangan sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian pada tahun 2013 samapi dengan 2017 dapa kita lihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 13. Grafik Perkembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.

Dari grafik di atas, dapat di jelaskan bahwa pada tahun 2013 perkembangan sumber daya manusia penyuluh sebanyak 1.430 sedangkan jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 600.613. dan jumlah kelompok tani sebanyak 13.850 dan jumlah gapoktan sebanyak 1.179.

Pada tahun 2014 perkembangan sumber daya manusia penyuluh sebanyak 1.289. sedangkan jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 621.939 dan jumlah kelompok tani sebanyak 15.839 dan jumlah gapoktan sebanyak 1.182.

Pada tahun 2015 perkembangan sumber daya manusia penyuluh sebanyak 1.258 sedangkan jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 623.302 dan jumlah kelompok tani sebanyak 16.169 dan jumlah gapoktan sebanyak 1.188.

Pada tahun 2016 perkembangan sumber daya manusia penyuluh sebanyak 1.143 sedangkan jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 624.120 dan jumlah kelompok tani sebanyak 17.054 dan jumlah gapoktan sebanyak 1.213.

Pada tahun 2017 perkembangan sumber daya manusia penyuluh sebanyak 1.891 sedangkan jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 624.500 dan jumlah kelompok tani sebanyak 18.480 dan jumlah gapoktan sebanyak 1.218.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) penyuluh pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - a. perkembangan sumber daya manusia penyuluh pertanian selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) meningkat dengan jumlah 78 penyuluh pertanian.
 - b. Perkembangan sumber daya manusia rumah tangga usaha pertanian selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) meningkat dengan jumlah 4996 rumah tangga usaha pertanian pertanian.
2. Perkembangan kelembagaan pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - a. Perkembangan kelembagaan kelompok tani selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) meningkat dengan jumlah 1.048 kelompok tani pertanian
 - b. Perkembangan kelembagaan gapoktan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) meningkat dengan jumlah 11 gapoktan pertanian.
3. Rasio distribusi sumber daya manusia penyuluh pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - a. Rasio distribusi sumber daya manusia penyuluh pertanian pada rumah tangga usaha pertanian selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017)

dengan perbandingan rata-rata sebesar 441 :1. Artinya satu orang penyuluh membimbing 441 rumah tangga usaha pertanian.

- b. Rasio distribusi sumber daya manusia penyuluh pertanian dengan kelompok tani selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) dengan perbandingan rata-rata sebesar 11:1. Artinya satu orang penyuluh membimbing 11 kelompok tani
- c. Rasio distribusi sumber daya manusia penyuluh pertanian dengan gapoktan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) dengan perbandingan rata-rata sebesar 1:1. Artinya satu orang penyuluh membimbing 1 gapoktan

6.2 Saran

1. Kepada Pemerintah

Penambahan jumlah tenaga penyuluh dan lembaga pertanian perlu dilakukan agar kegiatan penyuluh dapat dilakukan lebih optimal lagi.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya, agar menambah variabel lain diluar variabel penelitian ini. Misalnya aturan kebijakan penyuluh dan program lembaga penyuluh

DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, sabja.2011. Kelembagaan Petani: *Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. Sepa. VII (2): 109-190*
- Ambar Tegu Sulistiyani dan Rosidah, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu. Yogyakarta
- Arulchelvan dan viswanata.2006. *petter Of Usag Of Various Electronic Media By Higher education Students. International Jurnal Of Education And Devolopment Using Information And Comunication Tecnily (IJEDIC)*.
- Bambang Wahyudin.(1996). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung. Sulita.
- Hadi Prayitono, *ekonomi pembangunan* (jakarta:Ghalia Indonesia 1996) Cet Ke-1,h.35
- Herman Sofyandi (2008) *manajemen sumber daya manusia*, Penulis: Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kartasapoetra, A.G.,1991. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndaraha, Taliziduhu. (1999). *Pengantar Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marimin dan Magfirho, N.2010. *Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Rantai Posok*. Bogor:IPB Press.
- Margono, Slamet. 1978. *Kumpulan Bacaan Penyuluhan Pertanian*. IPB. Bogor
- Salim, F. 2005. *Dasar-dasar Penyuluh Pertanian*. Departemen Pertanian. Jakarta
- Slamet, R.M. 2000. Memantapkan Posisi dan MeningkatkanPeran Penyuluh Dalam Pembangunan. Disampaikan dalam *Seminar Pemberdayaan Manusia Pemberdayaan Manusia Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani* di Bogor, 25-26 September 2000
- Soehati,N.P 2005. *Programa Penyuluhan Pertanian Fungsional Penyuluh*. Jakarta: Departemen Pertanian.
- Soetrisno, Anik Suwandari dan Rijianto, 2006. *Pengantar Ilmu pertanian*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Tjiptoherijanto,Prijino,, 1996. *Sumber Daya Manusia dalam Pembangunann Nasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI

Tuhana Taufik Andrianto, *Pengantar Pertanian (Agraris, Agribisnis, Agroindustri dan Agroteknologi)*. (Global Pustaka Utama 2014:213)

Tuhana Taufik Andrianto, *Pengantar Pertanian (Agraris, Agribisnis, Agroindustri dan Agroteknologi)*. (Global Pustaka Utama 2014:214)

Tuhana Taufik Andrianto, *Pengantar Pertanian (Agraris, Agribisnis, Agroindustri dan Agroteknologi)*. (Global Pustaka Utama 2014:216)

Uphoff, Norma Thomas. 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Soucebook With Cases*. Kumaria Press.

Wahyuni, Sri.2003. *Kinerja Kelompo Tani Dalam Sistem Usahatani Dan Metode Pemberdayaan. Jurnal Litbang Pertanian, 22(1).Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian,Kementrian Pertanian Republik Indosia*. Jakarta

<http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-pertanian-bentuk-hasil-pertanian-petani-ilmu-geografi.html>

<https://netisulistiani.wordpress.com/penyuluhan/>

<http://sulse1.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?>

Lampiran 1. Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat



Lampiran 2. Jumlah Total Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun	Sumber Daya Manusia		Kelembagaan	
	Jumlah Penyuluhan Pertanian	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian	Jumlah Kelompok tani	Jumlah Gapoktan
2013	1.430	600.613	13.850	1.179
2014	1.289	621.939	15.839	1.182
2015	1.258	623.302	16.169	1.188
2016	1.143	624.120	17.054	1.213
2017	1.891	624.500	18.480	1.218

Sumber: Kantor Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Perkebunan 2017

Lampiran 3: Data Jumlah Penyuluh Pertanian di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lombok Barat	179	178	171	122	275
Lombok Tengah	246	190	187	139	263
Lombok Barat	280	228	225	254	265
Sumbawa	212	165	170	166	320
Dompu	114	112	115	81	195
Bima	175	170	175	195	209
Sumbawa Barat	63	62	62	65	126
Lombok Utara	54	54	55	33	62
Mataram	58	82	49	50	78
Kota Bima	49	48	49	38	98

Sumber: Kantor Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Perkebunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018

Lampiran 4: Data Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lombok Barat	59.518	59.620	59.610	59.643	59.650
Lombok Tengah	147.455	147.600	147.621	147.732	147.740
Lombok Timur	144.221	146.220	146.241	146.345	146.365
Sumbawa	69.022	70.055	70.201	70.398	70.451
Dompu	34.118	41.000	41.750	41.800	41.901
Bima	81.053	90.042	90.135	90.212	90.325
Sumbawa Barat	15.087	16.000	16.021	16.160	16.112
Lombok Utara	35.085	36.200	36.301	36.323	36.421
Mataram	5.719	5.800	5.861	5.875	5.894
Kota Bima	9.335	9.402	9.561	9.632	9.641

Sumber: Kantor Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Perkebunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018

Lampira 5: Data Jumlah Kelembagaan Kelompok Tani di Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lombok Barat	119	1.226	1.197	1.293	1.317
Lombok Tengah	200	1.965	2.327	2.416	2.444
Lombok Timur	256	3.101	2.640	2.994	3.069
Sumbawa	164	3.385	3.117	3.524	3.637
Dompu	89	1.160	1.122	1.389	1.409
Bima	173	2.983	3.398	2.900	3.924
Sumbawa Barat	64	1.126	1.124	1.048	1.153
Lombok Utara	33	328	610	829	849
Mataram	43	240	249	276	289
Kota Bima	38	325	385	385	389

Sumber: Kantor Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Perkebunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018

Lampiran 6: Data Jumlah Kelembagaan Gapoktan di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lombok Barat	1.212	121	1.197	122	122
Lombok Tengah	1.856	186	2.327	219	219
Lombok Timur	2.539	262	2.640	253	253
Sumbawa	2.618	164	3.117	164	164
Dompu	1.160	88	1.122	87	88
Bima	2.559	179	3.398	186	186
Sumbawa Barat	985	64	1.124	64	68
Lombok Utara	328	33	610	37	37
Mataram	268	43	249	43	43
Kota Bima	325	42	385	38	38

Sumber: Kantor Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Perkebunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018

Lampiran 7: Data Rasio Perbandingan Rumah Tangga Usaha Pertanian Dengan Penyuluh di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kabupaten/Kota	Rasio Rumah Tangga Usaha Pertanian dengan Penyuluh				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lombok Barat	333	335	349	489	217
Lombok Tengah	599	777	789	1.063	562
Lombok Timur	515	641	650	576	552
Sumbawa	326	425	413	424	220
Dompu	299	366	363	516	215
Bima	463	530	515	463	432
Sumbawa Barat	239	258	258	249	128
Lombok Utara	650	670	660	1.101	587
Mataram	99	71	120	118	76
Kota Bima	191	196	195	253	98

Sumber : Data Sekunder di Olah 2018

Lampiran 8: Data Rasio Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Dengan Jumlah Penyuluh di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian	Jumlah Penyuluh	Rasio	Rasio
2013	600.613	1.430	420	420 : 1
2014	621.939	1.289	482	482 : 1
2015	623.302	1.258	495	495 : 1
2016	624.120	1.143	546	546 : 1
2017	624.500	1.891	330	330 : 1
Jumlah	3.094.474	7.011	441	441 : 1

Sumber : Data Sekunder di Olah 2018

Lampiran 9: Data Rasio Perbandingan Jumlah Kelompok Tani Dengan Jumlah Penyuluh di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Kelompok Tani	Jumlah Penyuluh	Rasio	Rasio
2013	13.850	1.430	10	10 : 1
2014	15.839	1.289	12	12 : 1
2015	16.169	1.258	13	13 : 1
2016	17.054	1.143	15	15 : 1
2017	18.480	1.891	10	10 : 1
Jumlah	81.392	7.011	11	11 : 1

Sumber : Data Sekunder di Olah 2018

Lampiran 10: Data Rasio Perbandingan Gapoktan Dengan Jumlah Penyuluh di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Gapoktan	Jumlah Penyuluh	Rasio	Rasio
2013	1.179	1.430	1	1 : 1
2014	1.182	1.289	1	1 : 1
2015	1.188	1.258	1	1 : 1
2016	1.213	1.143	1	1 : 1
2017	1.218	1.891	1	1 : 1
Jumlah	5.980	7.011	1	1 : 1

Sumber : Data Sekunder di Olah 2018

Lampiran 7: Hasil Analisis Trend Perkembangan Sumberdaya Manusia Penyuluh Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,420542
R Square	0,176855
Adjusted R Square	-0,09753
Standard Error	305,6541
Observations	5

<i>ANOVA</i>					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	60217,6	60217,6	0,64456	0,48078
Residual	3	280273,2	93424,4		
Total	4	340490,8			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	-154962	194762,5	-0,79564	0,484378	-774783	464859,4	-774783	464859,4
TAHUN	77,6	96,6563	0,802845	0,48078	-230,003	385,2035	-230,003	385,2035

Lampiran 8. Hasil Analisis Trend Perkembangan Sumber Daya Manusia Rumah Tangga Usaha Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,769326
R Square	0,591862
Adjusted R Square	0,455816
Standard Error	7573,761
Observations	5

<i>ANOVA</i>					
	<i>Df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	2,5E+08	2,5E+08	4,350456	0,128293
Residual	3	1,72E+08	57361852		
Total	4	4,22E+08			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	-9447038	4825994	-1,95753	0,145202	-2,5E+07	5911428	2,5E+07	5911428
TAHUN	4995,5	2395,033	2,085775	0,128293	-2626,57	12617,57	2626,57	12617,57

Lampiran 9. Hasil analisis Trend Perkembangan Kelembagaan Kelompok Tani di Provinsi Nusa Tenggara Barat

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,97465
R Square	0,949942
Adjusted R Square	0,933257
Standard Error	439,0151
Observations	5

ANOVA

	<i>Df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	10972563	10972563	56,93105	0,004827
Residual	3	578202,7	192734,2		
Total	4	11550765			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	-2094434	279740	-7,48707	0,004935	-2984692	-1204177	-2984692	-1204177
TAHUN	1047,5	138,8288	7,545267	0,004827	605,6849	1489,315	605,6849	1489,315

Lampiran 10. Hasil analisis Trend Perkembangan Kelembagaan Gapoktan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,948005
R Square	0,898714
Adjusted R Square	0,864952
Standard Error	6,680818
Observations	5

<i>ANOVA</i>					
	<i>Df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	1188,1	1188,1	26,61912	0,014121
Residual	3	133,9	44,63333		
Total	4	1322			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	-20767,5	4257,011	-4,87842	0,016465	-34315,2	-7219,79	-34315,2	-7219,79
TAHUN	10,9	2,11266	5,159372	0,014121	4,176572	17,62343	4,176572	17,62343

Lambran 11. Dokumentasi Penelitian



Gambar: Hari pertama mengunjungi tempat penelitian di kantor Dinas Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan



Gambar: Pada Saat di Wawancarai Oleh Kepala Balai Diklat Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gambar: Pada Saat Proses Pengambilan Data

Lampiran 12. Surat Izin Penelitian

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jl. Bontomatene No. 259 Telp. 866972 Fax. (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail: fp@umuhmahkamah.com	
---	---	---

Nomor : 199/Izn-5/C.4-VIII/IV/37/2018
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

19 Rajab 1439 H
05 April 2018 M

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB
Cq. Kepala Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Perkebunan (BPPSDM-PP)
di -
NTB

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 486/FP/C.2-II/IV/39/2018 tanggal 3 April 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **YAHYA**
No. Stambuk : **10596 0160514**
Fakultas : **Fakultas Pertanian**
Jurusan : **Agribisnis**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Distribusi Sumber Daya Manusia Penyuluhan dan Kelembagaan pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 April 2018 s/d 7 Juni 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

04-18

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Dompu pada tanggal 15 Juni 1996 dari ayah Lukman dan ibu Mastin. Penulis anak ketiga dari enam bersaudara.

Pendidikan formal yang di lalui penulis adalah SDN 27 Dompu pada tahun 2008, SMP Negeri 5 Dompu pada tahun 2011, SMA Tridharma Kosgoro Dompu pada tahun 2014 dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar

Selama mengikuti perkuliahan penulis juga pernah mengikuti KKP (Kuliah Kerja Profesi) yang di tempatkan di Desa Lompoh Tengah Kecamatan Taneteraja Kabupaten Barru. Tugas Terakhir dalam pendidikan perguruan tinggi di selesaikan dengan menulis skripsi yang berjudul Analisis Distribusi Sumber Daya Manusia Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat.